YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i1.8882

PRRI DALAM BINGKAI NASIONALISME: JEJAK REUNI DIVISI BANTENG DAN TUNTUTAN OTONOMI

PRRI in the Framework of Nationalism: Traces of the Banteng Division Reunion and Demands for Autonomy

M Budiman & Muhammad Junaldi Jufri
Universitas Negeri Yogyakarta
mbudiman.2024@student.uny.ac.id; muhammadjunaldi.2024@student.uny.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 11, 2025	Jan 3, 2026	Jan 15, 2026	Jan 20, 2026

Abstract

This article is motivated by the dominance of historiographical narratives that interpret the Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI, Revolutionary Government of the Republic of Indonesia) solely as a separatist rebellion, without taking into account the context of center–region inequality and the dynamics of regional nationalism in the post-independence period. The study aims to analyze the role of the Reuni Divisi Banteng (Banteng Division Reunion) in the formation of the Dewan Banteng (Banteng Council) as the embryo of PRRI in West Sumatra and to explain the political, social, and ideological motives underlying it. Using a historical method with a sociological–critical approach and library research, the study follows the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, with its analysis supported by grievance theory and a center–region inequality framework. The findings show that the establishment of the Dewan Banteng was rooted in the structural marginalization of former Banteng Division fighters and development disparities concentrated in Java. PRRI emerged as an articulation of collective discontent over the neglect of demands for regional autonomy and equitable development, while also gaining broad support from civil society and nationalist

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

leaders. The study argues that PRRI was an expression of regional nationalism with a corrective character toward the centralization of power, rather than an attempt to secede from the Unitary State of the Republic of Indonesia. The conclusion challenges the labeling of PRRI merely as a rebellion and underscores the need to reassess Indonesia's political history narrative. The findings imply the importance of historiographical revision and the strengthening of decentralization as a form of justice, recognition of regional contributions, and consolidation of post-independence national integration.

Keywords: PRRI; Dewan Banteng; Reuni Divisi Banteng; Regional Nationalism; Center–Region Inequality

Abstrak: Artikel ini berangkat dari dominannya narasi historiografi yang memaknai Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) semata-mata sebagai pemberontakan separatis, tanpa mempertimbangkan konteks ketimpangan pusat–daerah dan dinamika nasionalisme daerah pascakemerdekaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Reuni Divisi Banteng dalam pembentukan Dewan Banteng sebagai embrio lahirnya PRRI di Sumatera Barat serta menjelaskan motif politik, sosial, dan ideologis yang melatarbelakanginya. Dengan menggunakan metode sejarah berpendekatan sosiologis-kritis dan studi pustaka, penelitian ini menempuh tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yang analisisnya didukung oleh teori *grievance* dan kerangka ketimpangan pusat–daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Banteng berakar pada marginalisasi struktural terhadap eks pejuang Divisi Banteng dan ketimpangan pembangunan yang berpusat di Jawa. PRRI muncul sebagai artikulasi kekecewaan kolektif terhadap pengabaian tuntutan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan, sekaligus memperoleh dukungan luas dari masyarakat sipil dan tokoh nasionalis. Temuan ini menegaskan bahwa PRRI merupakan ekspresi nasionalisme daerah yang bersifat korektif terhadap sentralisasi kekuasaan, bukan upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan penelitian menantang pelabelan PRRI sebagai pemberontakan semata dan menegaskan perlunya peninjauan ulang narasi sejarah politik Indonesia. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya revisi historiografis dan penguatan desentralisasi sebagai wujud keadilan, pengakuan kontribusi daerah, dan penguatan integrasi nasional pascakemerdekaan.

Kata Kunci: PRRI; Dewan Banteng; Reuni Divisi Banteng; Nasionalisme Daerah; Ketimpangan Pusat–Daerah

PENDAHULUAN

Rentang waktu 1948-1965 diwarnai oleh berbagai gejolak akibat situasi politik Indonesia yang penuh dengan persoalan. Beberapa masalah yang muncul pada akhir 1949 antara lain adalah pemberontakan PKI pada tahun 1948, berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), serta pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) (Ninawati, 2025). Permasalahan yang ada tidak kunjung terselesaikan, bahkan memicu munculnya persoalan baru yang lebih kompleks, salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Dasar

Sementara (UUDS) yang berlaku selama sembilan tahun, dari 1950 hingga 1959. Mulai 17 Agustus 1950, UUDS diberlakukan dan di dalamnya diatur mengenai sistem politik negara. Kebijakan yang tertuang dalam UUDS ini membawa perubahan pada sistem pemerintahan, dari yang semula presidensial menjadi parlementer. Dalam sistem parlementer ini, presiden tidak hanya berperan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga merangkap sebagai kepala negara (Aryasahab & Frizky. Dhoni, 2023; Simbolon, 2017)

Pasca kemerdekaan, bangsa indonesia menghadapi masa penemuan jati diri bangsa atau yang disebut dengan masa Disintegrasi, pada masa ini banyak terjadi perlawanan baik dari pusat maupun dari daerah di Indonesia. Hal ini berangkat dari berbagai masalah dan latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diawali dengan pembentukan dewan-dewan di Sumatera yang bertujuan untuk menyelamatkan Negara Republik Indonesia (Aryasahab & Frizky. Dhoni, 2023)

Pada pertengahan tahun 1950-an, timbul pergolakan daerah di Sumatera yakni reuni Devisi Banteng yang merumuskan gagasan yang bertujuan untuk perbaikan Indonesia, khususnya dalam konstalasi politik pusat yang pada waktu itu dalam situasi bergejolak, permasalahan Dwitunggal Soekarno-Hatta, friksi internal Angkatan Darat dan kondisi politik nasional (Kahin, 1998; Maulida, 2018).

Latar belakang berdirinya Dewan Banteng dikarenakan pada tahun 1949 terjadi perampingan Devisi Banteng (Brigade EE Banteng) , akibatnya banyak dari prajurit yang harus dipulangkan, hal ini membuat para prajurit merasa perjuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam Anggresi Militer tidak dihargai, dimana mereka sudah mempertaruhkan jiwa dan berjuang habis-habisan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga para perwira alumni Devisi Banteng yang masih berdinas mengadakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri 123 orang yang memutuskan untuk mengadakan reuni di Padang yang di pimpin oleh Letkol Ahmad Husein, yang dihadiri oleh juga oleh Kolonel Mauludin Simbolon sebagai penasehat, Kolonel Dahlan Djambek, dan kolonel Ismail Lengah dan tokoh lainnya(Leirissa, 1997; Rahman & Nugroho, 2023).

Devisi Banteng tidak bermaksud untuk melakukan pemberontakan, namun tujuannya adalah untuk perbaikan, khususnya dalam konstelasi politik pemerintahan pasca Pemilu 1955 semakin memanas dan untuk menyelesaikan permasalahan pusat dan daerah dengan mendorong agar terwujudnya otonomi daerah sebagai solusi dari permasalahan

tersebut. Perlawanan rakyat yang terjadi di Sumatera pada awal kemerdekaan ini sebenarnya bukanlah sebuah pemberontakan yang bertujuan untuk menggagalkan keutuhan bangsa namun untuk mewujudkan nilai pancasila dengan konsep persatuan dan keadilan yang merata di seluruh Indonesia.(Kahin, 1998; Zed & Chaniago, 2001).

Namun dalam beberapa penelitian sebelumnya salah penyebab terjadinya peristiwa PRRI dikarenakan adanya perjumpaan dua kepentingan yang berbeda, yaitu keinginan dari daerah-daerah membangun ekonomi yang lebih baik dengan otonomi daerah dan keinginan dari Amerika agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis. Sehigga menemukan keinginan gerakan antikomunis, yang mana banyak dari tokoh PRRI juga menentang Komunisme yang menganggap berlawanan dengan idelogi bangsa, dan dalam persaingan pengaruh ideologi dalam perang dingin dimana Amerika dengan pengaruh ideologi kapitalis mendukung gerakan ini supaya Indonesia tidak terpengaruh ideologi Komunis (Maulida, 2018; Ricklefs, 2008)(Leirissa, 1997; Maulida, 2018).

Berdasarkan teori Grievance oleh (Collier & Hoeffler, 2004), lahirnya PRRI bukan semata karena motif ekonomi atau kekuasaan, tetapi lebih karena akumulasi ketimpangan pusat-daerah yang mengakar sejak awal kemerdekaan. Reuni Devisi Banteng adalah bentuk artikulasi rasa keadilan yang tidak diakomodasi oleh pemerintahan pusat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Maulida, 2018) tujuan awal pertemuan Devisi Banteng adalah untuk mencari solusi terhadap disintegrasi bangsa. Maka narasi bahwa PRRI adalah bentuk separatisme semata menjadi bias bila tidak dilihat dalam bingkai nasionalisme daerah (Suryanto, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Reuni Devisi Banteng sebagai embrio dari lahirnya gerakan PRRI di Sumatera Barat dan menjelaskan motif dan ideologi di balik PRRI, termasuk upaya otonomi daerah dan ekspresi nasionalisme. Kemudian menjelaskan alasan mengapa perlawanan PRRI tidak dapat semata-mata dikategorikan sebagai pemberontakan, melainkan juga sebagai bentuk kritik terhadap ketimpangan pusat-daerah dan ekspresi nasionalisme daerah, agar narasi dominan yang menyederhanakan gerakan ini sebagai "pemberontakan" dapat direvisi secara ilmiah.

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif menggunakan metode sejarah dengan pendekatan Sosiologis dan studi pustaka yang didukung teori ketimpangan pusat-daerah, dan perlawanan daerah. Metode sejarah digunakan karena data yang dikaji merupakan

pengembangan peristiwa masa lampau (Sjamsuddin, 2012). Dalam metode sejarah dapat menemukan beberapa kemungkinan yang membuat sejarawan harus menemukan data yang bebas dari opini semata, fakta yang didapatkan harus jelas yang melalui langkah analitis-kritis dan objektivitas. Dalam metode sejarah ada empat tahapan yakni 1) pengumpulan sumber atau heuristik, 2) kritik sumber untuk memverifikasi sumber, 3) interpretasi dengan analisis dan sintesis, dan historiografi/penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2005).

HASIL

Penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Dewan Banteng berakar kuat dari Reuni Divisi Banteng sebagai respons atas marginalisasi struktural yang dialami para eks pejuang setelah kemerdekaan. Perampingan Divisi Banteng pada tahun 1949 menyebabkan banyak prajurit dipulangkan tanpa jaminan kesejahteraan maupun pengakuan simbolik atas jasa mereka dalam perang kemerdekaan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan kolektif yang berkembang menjadi kesadaran politik daerah, terutama di Sumatera Barat (Kahin, 1998; Leirissa, 1997).

Selain faktor militer, temuan penelitian memperlihatkan bahwa ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah menjadi pemicu utama menguatnya tuntutan otonomi. Pada dekade 1950-an, kebijakan pembangunan nasional lebih terpusat di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah luar Jawa, termasuk Sumatera Tengah, justru menyumbang devisa besar bagi negara. Ketimpangan ini memperkuat persepsi ketidakadilan struktural dan memperluas dukungan masyarakat sipil terhadap Dewan Banteng (Fauzi & Hadi, 2020; Nordholt, 2007; Sofian & Nahdiah, 2022).

Reuni Divisi Banteng yang berlangsung pada tahun 1956 tidak hanya berfungsi sebagai ajang silaturahmi veteran, tetapi berkembang menjadi ruang artikulasi politik yang melahirkan Dewan Banteng sebagai lembaga non-pemerintah. Dewan ini berfungsi sebagai alat tekanan moral dan politik terhadap pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan otonomi daerah, bukan sebagai sarana pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Redi Rachmat & dkk, 1992).

Dalam perspektif teori grievance, gerakan PRRI muncul sebagai akumulasi kekecewaan terhadap ketimpangan pusat-daerah yang tidak direspons secara memadai oleh pemerintah pusat. Collier dan Hoeffler (2004) menegaskan bahwa konflik politik sering kali lahir bukan karena ambisi kekuasaan semata, melainkan akibat rasa ketidakadilan yang

terstruktur. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa PRRI merupakan ekspresi nasionalisme daerah yang berorientasi korektif terhadap sentralisasi kekuasaan (Maulida, 2018; Putra & Yulika, 2021).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan tokoh-tokoh nasional seperti Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan Burhanuddin Harahap menunjukkan bahwa PRRI memiliki legitimasi ideologis dalam bingkai nasionalisme Indonesia. Gerakan ini tetap mengacu pada nilai-nilai Proklamasi dan Pancasila, sehingga pelabelan PRRI sebagai pemberontakan separatis menjadi kurang tepat secara historis dan sosiologis (Kahin, 1998).

Temuan lain menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dapat dipahami sebagai respons tidak langsung negara terhadap tekanan politik daerah. Pemekaran wilayah Sumatera Tengah menjadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi merupakan bukti bahwa tuntutan otonomi daerah yang diperjuangkan Dewan Banteng dan PRRI memiliki dampak nyata dalam kebijakan nasional (Nordholt, 2007; Sofian & Nahdiah, 2022).

PEMBAHASAN

Pembentukan Dewan Banteng ini berasal dari reuni Devisi Banteng, yang disebabkan oleh perampingan Devisi Banteng pada 1949 yang dijadikan satu brigade (Brigade EE Banteng), dimana akibatnya banyak dari prajurit yang dipaksa kembali ke kampung halaman yang membawa rasa kekecewaan, yang mana mereka sudah mempertaruhkan jiwa raga selama perang kemerdekaan, sehingga mucul perasaan "habis manis sampah dibuang". Ditambah lagi dengan permasalahan politik, pembangunan dan ekonomi pada tahun 1950-an yang lebih fokus di pulau Jawa padahal pulau-pulau laur Jawa menghasilkan 80 persen devisa negara. Kekecewaan masyarakat Sumatera Tengah juga karena ditunjuknya Ruslan Muljoharjo oleh pemerintah pusat sebagai gubernur Sumatera Tengah dimana pada saat itu Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) telah memiliki calon sendiri, namun malah DPRST yang dibekukan. Walaupun pada awalnya kekecewaan ini bisa diredam, namun setelah mundurnya Moh. Hatta sebagai wakil presiden membuat masyarakat Sumatera Tengah kembali mengembangkan pemahaman daerah untuk memunculkan legitimasi gerakan (Mangkusubroto, 2023; Suryanto, 2009).

Keadaan yang semakin jauh dari memuaskan ini membuat para alumni Devisi Banteng mengadakan reuni eks Devisi Banteng, disamping untuk menjalin silaturrahmi juga membahas tentang perkembangan situasi pemerintah. Tepat tanggal 21 September 1956 di Jakarta diadakan pertemuan untuk mempersiapkan reuni bagi eks pejuang yang dulu satu rumpun, pada pertemuan ini menyepakati untuk membentuk penitia reuni yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein yang akan dilaksanakan di Padang, dan untuk daerah lain dibentuk sub panitia. Hal ini mendapat respon positif dari masyarakat dan pedagang Minang yang ada di Jakarta. Kemudian pada 11 Oktober 1956 disahkanlah panita reuni ke-1 eks Devisi Banteng (Redi Rachmat & dkk, 1992).

Sebulan kemudian pada pelaksaan rapat reunian yang dilaksanakan di Padang tanggal 20 sampai 24 November 1956 yang dihadiri oleh 612 orang bekas pejuang kemerdekaan, salain itu juga hadir Kolonel M. Simbolon, Letkol Barlian. Gagasan dari reuni adalah pembangunan di semua bidang, dalam reuni ini Ahmad Husein, Hasan Basri, Kolonel M. Dahlan Djambek, Letkol Jazied Abidin, Kapten Nasrun, Kolonel Ismail Lengah, Kapten Djammur Djamin, Letkol Dahlan Ibrahim. Semua tokoh ini menyampaikan pidato yang berkaitan dengan pembangunan, nasib rakyat dan tentara serta realisasi otonomi daerah. Pada saat itu dibentuk lembaga non-pemerintah dengan nama Dewan Banteng (Redi Rachmat & dkk, 1992).

Kemudian dalam reunian ini bertujuan mengevaluasi hasil kemerdekaan dengan kesimpulan bahwa setelah 6 tahun setelah kemerdekaan pembangunan tidak berjalan baik terutama di luar pulau Jawa. Ini merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi kegagalan pembangunan oleh pemerintah pusat. Para tokoh militer di berbagai daerah mengambil inisiatif dengan membentuk satuan-satuan khusus. Akibatnya, pada tahun 1956 dan 1957 muncul beberapa dewan militer, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Ahmad Husein, Dewan Gajah di Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Kolonel Maludin Simbolon, serta Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian(Prasetiadi et al., 2021; Zed & Chaniago, 2001).

Namun dikarenakan perbedaan pandangan dan latar belakang masyarakat yang berbeda di Sumatera Utara dan di Palembang Dewan Gajah dan Dewan Garuda tidak bertahan lama, yang juga disebabkan karena Dewan Gajah di Sumaera Utara memiliki struktur masyarakat yang heterogen baik dari agama dan suku bangsa. Kemudian tanggal 7

dan 8 September 1957 Letkol Ahmad Husein, Vantje Sumual, dan Letkol Barlian mengadakan pertemuan yang melahirkan Piagam Palembang yang berisi tuntutan antara lain: mengembalikan Hatta ke Pemerintaan Nasional, membersihkan pengaruh komunis dalam Angkatan Bersenjata dan mayor AH Nasution harus digantikan, memberikan otonomi daerah seluas-luasnya, pembentukan senat yang mendukung kepentingan daerah, melarang ideologi komunis yang dianggap bertentangan dengan Pancasila (Pratiwi, 2016). Dengan adanya munas yang diselnggarakan di Jakarta atas usulan Perdana Menteri Juanda Tuntutan ini disampaikan di Munas tersebut, namun tuntutan ini tidak mendapat tanggapan positif dari pemerintah pusat, dikarenakan AH Nasution berhasil mempengaruhi Soekarno dengan mengatakan ada kepentingan terselubung dalam tuntutan tersebut, hal ini menambah kekecewaan daerah terutama daerah Sumatera Tengah. (Mangkusubroto, 2023),

Ketegangan serta kekecewaan semakin memuncak sehingga pada tanggal 8 februari 1958 Dewan Banteng yang di pimpin oleh Ahmad Husein melakukan pertemuan dengan para tokoh yang berasal dari Sumatera Tengah sehingga ternembentuk "Dewan Perjuangan" pada pertemuan di Sungai Dareh yang mengukuhkan Ahmad Huesin sebagai ketua Dewan Perjuangan. Pada awalnya Ahmad Husein dan para tokoh lainnya melakukan pendekatan dengan pemerintah dengan mengusulkan gagasan *reshuffle* kabinet Djuanda sambil mempersiapkan langkah selanjutnya. Kemudian dua hari setelahnya tanggal 10 Februari 1958 pertemuan di Padang Ahmad Husein dan tokoh Dewan Perjuangan akhirnya mengultimatum pemerintah dengan mengeluarkan Piagam Banteng (Maulida, 2018). Ultimatum tersebut berisi beberapa poin tuntutan kepada pemerintah pusat dengan kesimpulan yaitu: 1) menuntut Kabinet Juanda dibubarkan dalam waktu 5x24 jam dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden, 2) Moh. Hatta dan Hamengkubuwono ditunjuk untuk membentuk kabinet baru, 3) meminta Soekarno berperan sebagai presiden sesuai dengan konstitusi, 4) akan mengambil kebijakan sendiri jika tuntutan ini tidak penuhi pemerintahan pusat dalam waktu yang ditetapkan (Lorenza & Fikri, 2024)

Kemudian karena merasa tuntutan tidak ditanggapi Pemerintah Pusat maka tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein dan para tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Tengah seperti Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M Natsir dan Soemitro Joyohadikusumo membentuk pemerintahan tandingan dengan Perdana Menterinya Sjafruddin Prawiranegara yang berkedudukan di Padang. Walupun dalam penyelesaian sudah diusahakan dengan cara perundingan tetapi menemukan jalan buntu, sehingga pemerintah pusat meredam pergolakan dengan jalan militer (Zed & Chaniago, 2001).

Oleh sebab itu peristiwa pergolakan PRRI yang terjadi pada tahun 1958-1961 ini perlu untuk diluruskan, karena masih banyak memahami peristiwa PRRI sebagai sebuah pemberontakan. Namun jika dijelaskan secara etimologis pemberontakan adalah sebuah usaha untuk mengulingkan kekuasaan pemerintah yang sah dengan kekerasan, juga merupakan sebuah tindakan melawan penguasa dengan cara kekerasan fisik dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan alasan rasa frustasi dan tidak puasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya munculnya PRRI tidak bertujuan untuk melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia, namun suatu aksi protes terhadap perkembangan politik pada saat itu disebabkan perkembangan politik dan ekonomi dalam negeri yang tidak merata dengan daerah luar Jawa khususnya Sumatera Barat .(Putra & Yulika, 2021; Suryanto, 2009).

Dalam pernyataan Roeslan Moeljoharjo yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera Tengah mengemukakan bahwa gerakan revolisioner di Sumatera Tengah bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi bukan karena dorongan haus kekuasaan tidak bertujuan membuat negara dalam negara. Roeslan meyakini jika hubungan antara pusat dan daerah akan kembali normal apabila kabinet di pemerintahan pusat bisa mengatasi rasa terkekan dan ketidakpusan rakyat (Kahin, 1998)

Hakikat Dewan Banteng dan langkah-langkah yang diambilnya memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan pengambilalihan kekuasaan oleh para panglima militer di daerah lain serta berbeda pula dengan pemberontakan-pemberontakan Islam yang pernah terjadi di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Dewan Banteng memiliki kesatuan yang lebih kuat dibandingkan dewan-dewan militer lainnya, serta memperoleh dukungan dari berbagai lapisan masyarakat (Putra & Yulika, 2021). Latar belakang kemunculannya tidak terlalu berkaitan dengan konflik pribadi, melainkan lebih didorong oleh ketidakpuasan lama dari kelompok-kelompok sipil daerah, termasuk mantan anggota Divisi Banteng, terhadap posisi Sumatra Barat setelah Indonesia merdeka. Selama enam bulan setelah pendiriannya pada 20 Desember 1956, Dewan Banteng berhasil mencapai banyak tujuan utamanya, dan pemerintah pusat tampaknya berniat memberikan otonomi daerah sesuai tuntutan para pemimpin militer maupun sipil di daerah (Kahin, 1998)

Sehingga pada tahun 1957, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan

rinci mengenai konsep pemerintahan serta penataan daerah, khususnya dalam hal penerapan asas desentralisasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu buktinya adalah pemekaran Provinsi Sumatera Tengah menjadi tiga provinsi baru, yaitu Jambi, Riau, dan Sumatera Barat (Sofian & Nahdiah, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab rumusan masalah mengenai makna politik gerakan PRRI dengan menunjukkan bahwa Reuni Divisi Banteng dan pembentukan Dewan Banteng bukanlah ekspresi separatisme, melainkan artikulasi kekecewaan kolektif terhadap ketimpangan relasi pusat–daerah dan marginalisasi struktural terhadap tentara eks-Devisi Banteng. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap pembangunan yang terpusat di Jawa, dominasi kekuasaan politik nasional, serta pengabaian aspirasi daerah, khususnya Sumatera Barat. Dalam kerangka teori *grievance*, PRRI mencerminkan ekspresi nasionalisme daerah yang memperjuangkan keadilan, desentralisasi, dan otonomi daerah sebagai bagian integral dari cita-cita kemerdekaan. Temuan ini sekaligus menantang narasi historiografis dominan yang menyederhanakan PRRI sebagai "pemberontakan", serta menegaskan pentingnya pembacaan ulang sejarah dengan pendekatan sosiologis-kritis untuk memahami PRRI sebagai gerakan korektif yang memiliki legitimasi moral dan politis. Dengan demikian, pelabelan "pemberontakan" terhadap PRRI perlu dikaji ulang demi keadilan historiografis dan penguatan rekonsiliasi nasional.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas perspektif historis terhadap PRRI dengan menggeser fokus dari stigmatisasi politik menuju pemahaman atas dinamika nasionalisme daerah, ketimpangan pusat–daerah, dan artikulasi tuntutan otonomi. Temuan tersebut memperkaya kajian sejarah politik Indonesia dan membuka ruang reinterpretasi terhadap hubungan pusat–daerah pada masa transisi demokrasi awal, sekaligus menegaskan relevansi pendekatan sosiologis-kritis dalam studi gerakan politik regional. Selain itu, penelitian ini menyediakan dasar konseptual bagi kajian interdisipliner yang menghubungkan sejarah, ilmu politik, dan sosiologi dalam membaca kembali posisi PRRI dalam lanskap Indonesia modern.

Berdasarkan keterbatasan ruang lingkup analisis dan sumber-sumber yang digunakan, penelitian lanjutan disarankan untuk memperdalam kajian mengenai PRRI dan Dewan Banteng melalui perluasan korpus sumber arsip, kesaksian pelaku dan saksi sezaman, serta

studi komparatif dengan gerakan politik daerah lainnya. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan analisis interdisipliner yang lebih eksplisit, misalnya dengan menggabungkan perspektif sejarah, ilmu politik, dan sosiologi politik untuk menguji lebih jauh mekanisme nasionalisme daerah, relasi pusat–daerah, serta konsekuensi jangka panjang pelabelan "pemberontakan" terhadap memori kolektif dan rekonsiliasi nasional. Dengan demikian, studi-studi selanjutnya diharapkan mampu memantapkan reposisi PRRI dalam historiografi Indonesia sekaligus memperkaya diskursus tentang keadilan politik dan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aryasahab, & Frizky Dhoni. (2023). Sejarah PRRI/Permesta: Awal Mula Munculnya Otonomi Daerah secara Menyeluruh di Indonesia. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 8*(1), 37–44.

Collier, P., & Hoeffler, A. (2004). Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers, 56*(4), 563–595. https://doi.org/10.1093/oep/gpf064

Fauzi, A., & Hadi, S. (2020). Hubungan Pusat dan Daerah dalam Dinamika Politik Indonesia Pascakemerdekaan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha, 5*(2), 98–110.

Kahin, A. R. (1998). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926–1998*. Yayasan Obor Indonesia.

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.

Leirissa, R. Z. (1997). *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Pustaka Utama Grafiti.

Lorenza, C., Bunari, & Fikri, A. (2024). PRRI suppression operation in Sungai Pagar (1958–1961). *Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora, 8*(1), 1061–1066. https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3819

Mangkusubroto, M. I. (2023). Diplomasi Tentara Nasional Indonesia Era Presiden Soekarno. *Jurnal Kewarganegaraan, 7*(2), 2491–2496. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jk/article/view/60379

Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih PRRI–Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda. *Paradigma: Jurnal Sosial Humaniora, 8*(2), 174–185. https://journal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3617

Ninawati, M. (2025). *Fenomena Politik Indonesia: Perspektif Sejarah, Sosial, dan Budaya*. Madani Kreatif Publisher.

Nordholt, H. S. (2007). *Otonomi Daerah di Indonesia*. KITLV Press.

Prasetiadi, D. Z., Marjono, M., & Sumardi, S. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958–1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 9*(1), 23–34. https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000

Pratiwi, S. E. (2016). Pembubaran Partai Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 4*(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/17512

Putra, R. A., & Yulika, F. (2021). Nasionalisme Daerah dalam Pergolakan PRRI di Sumatera Barat. *Jurnal Sejarah Dan Budaya, 15*(1), 45–60.

Rahman, F., & Nugroho, A. (2023). Militer dan Politik pada Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia (1950–1959). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 6*(2), 137–150.

Redi Rachmat, R., & dkk. (1992). *Tantangan dan Rongrongan terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Simbolon, M. D. (2017). Pergolakan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Stabilitas Nasional Indonesia 1950–1965. *Jurnal Sejarah Dan Budaya, 11*(2), 165–178.

Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak. https://opac.perpusnas.go.id

Sofian, S., & Nahdiah, M. (2022). Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Masa Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Keadilan, 3*(1). https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/keadilan/article/view/25768

Suryanto, J. (2009). *Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958–1961* [Skripsi, Universitas Sanata Dharma]. https://repository.usd.ac.id

Zed, M., & Chaniago, H. (2001). *Ahmad Husein, Perlawanan Seorang Pejuang (Biografi Ahmad Husein)*. Pustaka Sinar Harapan.